

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN
TERHADAP PELUNASAN UTANG PPH
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT**



Diajukan Oleh:

**AKMAL PAISAL
NIM.01013130017**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

S
343.59807
Pai
P
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



SKRIPSI

16277

16639.

PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN
TERHADAP PELUNASAN UTANG PPH
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT



Diajukan Oleh:

AKMAL PAISAL
NIM.01013130017

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : AKMAL PAISAL
NIM : 01013130017
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN
TERHADAP PELUNASAN UTANG PPH DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT**


PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal


Pembimbing I :



Drs. H. Tandzil Djuanedi, Ak.

Tanggal

Pembimbing II :



Lukluk Fuadah, SE, Ak. MBA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : AKMAL PAISAL
NIM : 01013130017
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN
TERHADAP PELUNASAN UTANG PPh DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR
BARAT

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 22 November 2007 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 30 November 2007

Ketua,




Drs. H. Tandzil Djunaedi, Ak
NIP. 130675375

Anggota,



Lukluk Fuadah, SE, Ak, MBA
NIP. 132231459

Anggota,



Drs. Burhanuddin, Ak, M. Acc.
NIP. 131801649

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Dra. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak
NIP. 132000097

MOTTO:

"kalah dengan berjuang, lebih menyenangkan dibanding menang dengan cara curang"

"kegagalan adalah sisi dari keberhasilan, keberhasilan tanpa kegagalan adalah keberuntungan"

"Tugas ini kuselesaikan untukku, masa depanku, keluargaku, orang-orang yang kucintai, serta orang-orang yang mencintainya"

- ≡ terima kasihQ kepada ayah dan ibu, untuk semua pelajaran tentang cara menjalani hidup. HakQ telah kalian penuhi, kini giliranQ untuk melaksanakan kewajibanQ.
 - ≡ for my brothers and sisters, thanks for jazzing up my life.
 - ≡ untuk semua kasih sayang, perhatian, dan sokongan dana, Makasih banyak my grandma (little mom).
 - ≡ Buat om eno', yang sudah begitu banyak membantuQ dan keluargaQ, Thanks. I respect you.
-
-

- ≡ budak Ak'01 yang tamat duluan dari kami kecuali doddy, yadi, n koko, mati pegi kamu galo-galo. Katek urusan.
 - ≡ Daus d'ustadz, wahyu "who always have the latest collections", dian Vs arista (hajarla Bro), Qomar d'hotest executive, Payo es tamat-tamatlah pulo mako pacak b'tempoer barengan.
 - ≡ PA'e n aNdrie ooo. Bareng kito es, dak acak idak.
-
-

- ≡ Budak ak'04 (rizal, helmi, ade, adon, rincan, n lai) bunuh b kawan kamu klo dak galak nolong. kecuali diki yo dak, taulah dewek..
 - ≡ Budak ak'03 (dedi, daus, n indah) aq duluan es.
-
-

- ≡ Mgt 01 (kampleng, rori, punk, dafi),. Dak acak idak es, hebatlah ane dari ente. Kejingok'an dari siapa yg duluan tamat.
 - ≡ Mgt 02 (ferdi, lian, n je) jangan pulo dimelok'I senior kalian tu.
 - ≡ Masyarakat Ekonomi Bersatu (ari aryadi, andi gubma, andi thunder, aang, kalil, rudi tabuti (ep). Arika, oland, yudi (mgt), budak ak aq dak pulo tau)
 - ≡ Budak mgt n eP, jangan ad lagi sentimen jurusan es.
-
-

- ≡ Yayan saleeeem, Agoeng Kambenng, Aam 'The big', Benny 'gak gondrong lagi', denny ceper, aries 'gas n gas, kelek, aidil junior of napoleon', koeyoeng, ferry 'tegam', muchtar junior, cek-O1, n ferdee d'nurse ___ Friend will be Friend, Friend till the end ___..

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, dan hanya berkat taufik dan hidayahnya skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN TERHADAP PELUNASAN UTANG PPH DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT”

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun hasilnya tetap jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala bentuk kritik dan saran dari para pembaca.

Selama proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, serta menyumbangkan pikiran, tenaga, dan menularkan kemampuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Syamsurijal Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Rina Tjandrakirana DP. SE, MM, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. H. Tanzil Djunaedi, Ak. selaku Dosen Ketua Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Lukluk Fuadah SE, MBA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Rela Sari SE, Msi, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Drs. Burhannudin, Macc, Ak. selaku Dosen Penguji.

7. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi khususnya Dosen Jurusan Akuntansi.
8. Semua staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terutama Yuk Al, Pak Heru, dan Pak Tuter.
9. KGS. M Fahrurrozi sebagai pegawai Kantor Pelayanan PBB Palembang, Pak Alim dan bung Rian selaku pegawai KPP Palembang Ilir Barat yang telah bersedia memberikan data.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

15 Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
I.1	Latar Belakang 1
I.2	Perumusan Masalah 5
I.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
I.3.1	Tujuan Penelitian..... 5
I.3.2	Manfaat Penelitian. 5
I.4	Metodologi Penelitian 6
I.5	Sistematika Pembahasan 8
BAB II	LANDASAN TEORI
II.1	Konsep Dasar Perpajakan 10
II.1.1	Pengertian Pajak..... 10
II.1.2	Pembagian Jenis Pajak..... 11
II.1.3	Fungsi dan Peranan Pajak..... 12
II.1.4	Asas Pemungutan dan Pengenaan Pajak..... 15
II.1.5	Syarat Pemungutan Pajak..... 19
II.1.6	Sistem Pemungutan Pajak..... 22
II.2	Pajak Penghasilan..... 22
II.2.1	Pengertian Penghasilan..... 22
II.2.2	Subjek Pajak dan Wajib Pajak..... 24
II.2.3	Objek Pajak..... 26
II.2.4	Tarif Pajak.. 30
II.3	Penagihan Pajak..... 30



BAB III	GAMBARAN UMUM KPP PALEMBANG ILIR BARAT	
III.1	Gambaran Umum KPP Palembang Ilir Barat...	36
III.2	Visi dan Misi.....	48
III.3	Hasil Penelitian.....	50
BAB IV	ANALISA PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN TERHADAP PELUNASAN UTANG PPh DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT	
IV.1	Pelaksanaan Penagihan di KPP Palembang Ilir Barat.....	55
IV.2	Kendala Saat Pelaksanaan Penagihan.....	72
IV.3	Analisa Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Terhadap Pelunasan Utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat	73
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1	Kesimpulan	79
V.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Jumlah Wajib Pajak.....	50
Tabel 3.2	Daftar Tunggakan Pajak.....	50
Tabel 3.3	Daftar Penerimaan Pajak.....	50
Tabel 3.4	Daftar Jumlah STP Yang Dikeluarkan.....	51
Tabel 3.5	Daftar Jumlah SKPKB Yang Dikeluarkan.....	51
Tabel 3.6	Daftar Jumlah SKPKB Tambahan Yang Dikeluarkan.....	51
Tabel 3.7	Daftar Jumlah SK. Pembetulan, SK. Keberatan Dan Putusan Banding	52
Tabel 3.8	Daftar Jumlah Surat Teguran Yang Dikeluarkan.....	52
Tabel 3.9	Daftar Jumlah Surat Paksa Yang Dikeluarkan.....	52
Tabel 3.10	Daftar Jumlah Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.....	53
Tabel 3.11	Daftar Jumlah Kegiatan Penyitaan.....	53
Tabel 3.12	Daftar Jumlah Kegiatan Lelang.....	53
Tabel 3.13	Daftar Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penyanderaan ...	54
Tabel 4.1	Persentase Pelunasan Tagihan Pajak Dengan Diterbitkannya STP.....	57
Tabel 4.2	Persentase Pelunasan Tagihan Pajak Dengan Diterbitkannya SKPKB.....	57
Tabel 4.3	Persentase Pelunasan Tagihan Pajak Dengan Diterbitkannya SKPKBT.....	57
Tabel 4.4	Persentase Pelunasan Tunggakan Pajak Dengan Diterbitkannya Surat Teguran.....	59
Tabel 4.5	Persentase Pelunasan Tunggakan Pajak Dengan Diterbitkannya Surat Paksa.....	62
Tabel 4.6	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyitaan.....	67
Tabel 4.7	Daftar Jumlah Kegiatan Lelang.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dan mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini mengakibatkan semakin terpuruknya kondisi keuangan negara. Hal ini bisa dilihat dari besarnya jumlah cicilan utang yang harus dibayar pada tahun 2007 yang mencapai 200 triliun rupiah atau sepertiga dari total pengeluaran (RAPBN 2007). Kondisi ini diperparah dengan besarnya pengeluaran untuk memperbaiki infrastruktur yang hancur akibat beragam bencana yang datang silih berganti.

Ekspor minyak dan gas bumi yang beberapa waktu lalu menjadi sumber utama penerimaan negara, kini semakin menurun perannya dalam struktur penerimaan dalam negeri. Hal ini diakibatkan ketidakmampuan sektor migas dalam mencukupi kebutuhan dana yang semakin meningkat (Suharno:1003:9). Begitu juga dengan ekspor komoditas hasil hutan yang diharapkan bisa mengurangi ketergantungan penerimaan negara kita terhadap ekspor minyak dan gas bumi, juga tidak bisa bertahan lama dalam menyokong penerimaan negara. Pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dibidang dilakukan secara tidak bertanggung jawab ini dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya. Hal ini bisa dilihat dari besarnya kerusakan alam dan juga bencana yang terus terjadi akhir-akhir ini akibat eksplorasi yang berlebihan tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati segelintir golongan.

Berkurangnya cadangan sumber daya alam kita yang malah diiringi dengan semakin besarnya utang luar negeri menggambarkan secara jelas bahwa langkah pemerintah dalam mengupayakan peningkatan penerimaan negara dengan mengandalkan sektor-sektor tersebut merupakan suatu kesalahan.

Pemerintah harus mulai berpikir keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru. Berharap pada laba BUMN sudah tidak mungkin, karena sebagian perusahaan-perusahaan milik negara tersebut tidak bisa memberi kontribusi yang berarti dalam struktur penerimaan negara. Menjual aset-aset negara melalui privatisasi BUMN juga bukan merupakan solusi yang tepat karena akan merubah perusahaan tersebut menjadi entitas bisnis murni yang hanya berprioritas pada penciptaan laba semata, tanpa mpedulikan fungsi-fungsi sosial yang biasanya melekat pada perusahaan negara. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang masih bisa diharapkan untuk mengatasi defisit anggaran tersebut adalah sektor pajak.

Roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa didukung oleh dana, terutama dana yang berasal dari pajak. Kesadaran pemerintah akan pentingnya sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan untuk menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat pada era globalisasi dimulai tahun 1983. Reformasi perpajakan (*tax reform*) 1983, telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, dimana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina, dan penyedia

fasilitas. Saat itu, melalui kesepakatan dan kemauan politik bersama antara pemerintah dengan masyarakat (melalui wakilnya di DPR) yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan, terjadi perubahan mendasar dalam sistem perhitungan dan penetapan pajak, yakni dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Bila semula dengan *official assessment system*, besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh masyarakat dihitung oleh kantor pajak. Dengan sistem ini, banyak yang beranggapan dan memberikan kesan bahwa penetapan pajak dilakukan secara sepihak. Sehingga pajak dianggap sebagai momok, karena setiap saat dianggap bisa muncul ketetapan pajak yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Dengan *self assessment system*, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajak sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KPP hanya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, apakah masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pemeriksaan pajak, yang tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bila ada yang belum atau tidak sesuai, akan dihitung kembali besarnya pajak yang terutang, dan diterbitkan ketetapan pajak.

Menurut administrasi pajak, saat terutang pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan awal dimana negara akan dan telah membukukan penerimaan pajak dari masyarakat, dan apabila waktu pembayaran

pajak tersebut telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran maka langsung dikenakan sanksi berupa bunga dua persen perbulan.

Namun ada sisi lain yang sering tidak dirasakan oleh masyarakat sendiri, bahwa setiap pajak yang terutang (baik dengan *self assessment system* maupun karena ketetapan pajak) merupakan penerimaan negara yang seharusnya sudah terealisasi, yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat banyak yang berarti saat itu juga telah terjadi korupsi atas uang pajak oleh masyarakat, karena negara telah dirugikan (Liberty Pandiangan:2005). Oleh karena itu, KPP akan melakukan tindakan penagihan pajak bagi masyarakat yang mempunyai utang pajak. Tindakan yang dilakukan dimulai dengan Surat Teguran, kemudian dilakukan tahapan tindakan selanjutnya. Secara berturut-turut dengan Surat Paksa, penyitaan atas harta yang dimiliki, hingga dilakukan lelang. Selain itu, dapat juga tindakan bepergian keluar negeri maupun penyanderaan (*gijzeling*). Jika ada indikasi yang bersangkutan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu, demikian juga bila memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, maka KPP akan melakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Terhadap Pelunasan Utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dijadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana prosedur dan pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi selama proses penagihan tersebut?
- 3) Bagaimana pengaruh pelaksanaan penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.
- 2) Mengetahui berbagai kendala yang ditemui selama proses penagihan tersebut.
- 3) Mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai penagihan pajak khususnya penagihan PPh.

- 2) Sebagai acuan bagi pihak lain khususnya rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai penagihan pajak.

1.4. Metodologi Penelitian

Agar penelitian ini lebih terencana dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan suatu kerangka acuan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan penelitian. Adapun kerangka acuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat terletak di jalan Kapten A. Rivai.

- 2) Ruang Lingkup Pembahasan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat dan kendala-kendala yang sering muncul selama proses tersebut., serta mengenai pengaruh pelaksanaan penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.

- 3) Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat, terdiri dari:
 - 1) Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

- 2) Data jumlah utang PPh tahun 2005 dan 2006
 - 3) Data realisasi penerimaan PPh tahun 2005 dan 2006
 - 4) Data Pelaksanaan kegiatan penagihan yang dilakukan dari tahun 2005 dan 2006
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku teks, literatur dan makalah seperti Undang-Undang Perpajakan dan hasil riset mengenai perpajakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Kegiatan observasi, dimana data diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilapangan.
 - b. Studi pustaka, dimana data diperoleh dari berbagai buku teks dan literatur yang membahas mengenai penagihan pajak.
 - c. *Browsing*, dimana data didapat melalui penelusuran di internet
 - d. Kegiatan Wawancara, dimana data diperoleh dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas atas informasi yang ingin diperoleh.
- 4) Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan yaitu:

- a. Teknik Analisa Deskriptif, digunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat dan menjelaskan mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama proses penagihan tersebut..

- b. Teknik Analisa Deskriptif Kuantitatif, digunakan untuk menjelaskan mengenai pengaruh pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan penelitian, metodologi penelitian yang akan digunakan, serta sistematika pembahasan agar penelitian dapat disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai konsep dasar perpajakan, teori dan kebijakan yang berhubungan dengan pajak penghasilan, serta ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

BAB III. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat, serta hasil yang diperoleh dari penelitian di KPP Palembang Ilir Barat..

BAB IV. ANALISA PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN TERHADAP PELUNASAN UTANG PPh DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai proses pelaksanaan penagihan dan kendala yang dihadapi selama proses tersebut, serta pembahasan mengenai pengaruh pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan secara umum yang dapat diambil dari hasil pembahasan penelitian, dan juga saran-saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. Iqbal, 2003, *Sengketa Pajak: Penyanderaan Penagihan Pajak*, disampaikan pada *Seminar Perpajakan*, Jakarta, 6 Agustus 2003. Diakses dari www.forum
- Djuanda, Gustian, dan Lubis, Irwansyah, 2004, *Pelaporan Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hadi, Moeljo, 2001, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Juru Sita Pusat Dan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Munawir, 1992, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty
- Muqodim, 2000, *Perpajakan (buku satu)*, Yogyakarta: UII Press
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Penghasilan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Dengan Surat Paksa
- Samudra, Azhari A, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak*, Jakarta: Hecca Publishing
- Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco
- Suhrno, 2003, *Pajak Properti di Indonesia, Kajian Teoritis dan Praktis*, Direktorat PBB dan BPHTB
- _____, 2003, *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*, Direktorat PBB dan BPHTB
- Umar, Husein, 2003, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali Pers